KLIPING PERPUSTAKAAN DPR-RI
http://kliping.dpr.go.id

Judul : Pansus Hak Angket Segera Berakhir
Tanggal : Jumat, 12 Januari 2018
Surat Kabar : Republika
Halaman : 3

Pansus Hak Angket Segera Berakhir

● ALI MANSUR

JAKARTA — Masa kerja Panitia Khusus (Pansus) Hak Angket KPK di DPR segera berakhir. Saat ini, Pansus Hak Angket tengah menyiapkan rekomendasi-rekomendasi terkait dengan pengawasan KPK selama 15 tahun ke depan.

Ketua Pansus Hak Angket KPK, Agun Gunandjar, mengatakan, dalam politik ada awal dan ada akhir, ada proses, ada latar belakang, dan ada tujuan. Panitia Hak Angket KPK dibentuk dengan tujuan mengawasi kinerja KPK selama 15 tahun berIangsung.

"Bagaimanapun, Pansus Hak Angket KPK segera mengakhiri tugasnya yang diharapkan bisa selesai pada masa sidang ini," kata Agun Gunandjar dalam keterangannya di Kompleks Parlemen, Jakarta, Kamis (11/1).

Untuk itu, Pansus Hak Angket KPK sudah berhasil melakukan langkah-langkah penyelidikan melalui berbagai kesempatan. Mulai dari rapat-rapat internal, kunjungan Iapangan, pemanggilan dan pemeriksaan berbagai pihak, hingga meminta pandangan dan pendapat dari pakar dan ahli.

"Alhamdulillah, hingga saat ini Pansus telah dapat merumuskan hasil penyelidikan yang meliputi aspek kelembagaan, kewenangan, keuangan dan anggaran, serta aspek tata kelola sumber daya manusia," kata politikus Partai Golkar itu.

Agun menambahkan, saat ini pihaknya tinggal merumuskan kesimpulan-kesimpulan rekomendasi. Untuk itu, sesuai keputusan rapat konsultasi dilanjutkan rapat paripurna. Kemudian bahan-bahan tersebut telah dikirimkan kepada masing-masing fraksi untuk dibicarakan di internal fraksi DPR.

Agun melanjutkan, Pansus Hak Angket KPK dalam bekerja sangat menghargai dan mempertimbangkan proses hukum dan proses politik yang terjadi saat itu. Seperti tidak melakukan upaya pemanggilan paksa dengan adanya proses hukum *judicial review* di MK.

Sementara, pada Kamis (11/1), Partai Golkar menggelar rapat pleno untuk membahas keanggotannya sebagai Pansus Hak Angket KPK. "Rapat membahas kebijakan Partai Golkar seperti keanggotaan Golkar dalam Pansus Hak Angket KPK," kata anggota DPR dari Fraksi Golkar, Ace Hasan Syadzily.

Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto mengatakan, rapat tersebut merupakan tindak lanjut dari wacana Golkar yang mempertimbangkan untuk mencabut keanggotaannya dari Pansus Angket KPK. Wacana ini muncul karena Golkar kini mengusung slogan "Golkar Bersih".

Saat ditanya apakah Fraksi Golkar sudah bulat untuk memutuskan keluar dari keanggotaan Pansus, Airlangga mengatakan, hal itu akan terjawab setelah rapat berakhir.

Usai rapat, Airlangga menegaskan bahwa dirinya menginginkan agar kerja Pansus Hak Angket KPK segera diakhiri. Menurutnya, salah satu alasannya adalah karena sudah tiga kali berturut-turut masa sidang, maka ini sudah harus mengambil kesimpulan.

"Salah satu yang menjadi target adalah terkait dengan Pansus KPK untuk segera diselesaikan," ujar Airlangga, sesaat setelah rapat pleno.

Pansus Hak Angket KPK dibentuk pada Mei 2017 lalu. Namun, tidak seluruh fraksi di DPR yang mengirimkan anggotanya untuk menjadi Pansus Hak Angket.

Pembentukan pansus dimulai dimulai dari protes yang dilayangkan sejumlah anggota Komisi III kepada KPK terkait persidangan kasus dugaan korupsi proyek KTP-el di Pengadilan Tipikor Jakarta.

Dalam persidangan, penyidik KPK, Novel Baswedan, yang dikonfrontasi dengan politikus Hanura Miryam S Haryani, mengatakan bahwa Miryam ditekan oleh sejumlah anggota Komisi III DPR agar tidak mengungkap kasus korupsi dalam pengadaan KTP-el.

Menurut Novel, hal itu diceritakan Miryam saat diperiksa di gedung KPK. Melalui Pansus Hak Angket, Komisi III ingin rekaman pemeriksaan Miryam di KPK diputar secara terbuka serta beberapa hal lainnya.

■ **ed:** muhammad hafil